

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pemekaran daerah secara intensif berkembang Sejak Era *Pascakolonial* perjuangan Kemerdekaan pada tahun 1945-1949. Terjadi Pemekaran diwilayah diindonesia, pemekaran tersebut antara lain pembagian wilayah terdiri atas 8 propinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda.¹Hal ini terus berlanjut dengan diadakannya berbagai landasan kontitusional produk politik penting yang memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan antara daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbicara tentang hubungan daerah-daerah yang ada di NKRI tidak dapat dilepaskan dari pembincangan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa; Negara indonesia adalah kesatuan berbentuk republik. Amanat tersebut mempunyai pesan yang sangat bermakna bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada Tanggal 17 Agustus 1945 ini dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan. Oleh karenanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, haruslah diletakan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan.

¹ Beberapa langkah yang di lakukan PPKI sebagai berikut;

- 1.) Pada tanggal 18 Agustus 1945; mengesahkan dan menetapkan UUD 1945.
- 2.) Tanggal 19 Agustus 1945; pembagian wilayah terdiri 8 propinsi. Lihat Buku Joni Apriyanto, *Sejarah Gorontalo Modern*.(Cetakan ke-II, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2011) hal. 141-142

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari provinsi Sulawesi. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pasca kemerdekaan adalah saatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Rongrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah-belah dimana Indonesia ingin dijadikan negara serikat. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati rongrongan itu dan tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu propinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960. Pada tahun 1960 Sulawesi dibagi dua menjadi Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribukota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribukota di Manado. Pada tahun 1964, propinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi propinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado dan Sulawesi Tengah yang beribukota di Palu yang terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya kabupaten Buol-Toli-Toli.²

Pada tahun 1960 wilayah Buol bergabung dengan wilayah Toli-Toli dan membentuk salah satu kabupaten yang ada di propinsi Sulawesi Tengah yang bernama kabupaten Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Sebelum Buol dibentuk menjadi kabupaten,³ Buol mempunyai sejarah perjalanan yang sangat panjang pada masa lalunya Buol merupakan kerajaan yaitu kerajaan Buol yang dipimpin oleh seorang raja *Madika* raja Eato Muhammad

²Undang-Undang No 47 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

³Lihat Jurnal Sukrinto S. Alijuana, *Perkembangan Pendidikan di Buol Abad XX*, hal, 3

Tahir yaitu sekitar pertengahan abad ke-16 yang berkedudukan di atingola dan biau sumalata, karena pada pertengahan abad ke-16 kerajaan buol sangat luas meliputi daerah-daerah buroko, kaidipan dan kuandang.⁴

Sejak era reformasi dimulai sistem pemerintahan berubah dari sentralistik menuju desentralisasi, perubahan itu menciptakan gelombang perubahan yang besar dimana di daerah-daerah memunculkan keinginan untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom. Perjuangan pemekaran daerah-daerah salah satu dampak dari kebebasan yang terpendam selama masa orde baru.

Salah satu tuntutan era reformasi 1998 adalah otonom daerah, Disaat itulah para pejuang masyarakat buol ingin memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri pada tahun 1999, di karenakan pada tahun 1964-1998 buol masih tergabung dalam dua daerah yaitu daerah tingkat II kabupaten buol-tolitoli. dengan hal ini munculah gerakan sosial-politik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat buol, timbul pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang ada di wilayah buol dan di rantau, seperti di makassar, palu, jakarta dan di gorontalo, untuk melaksanakan simposium dialog yang berjudul *Buol Hari Ini dan Kedepan*. Dengan adanya simposium tersebut, hampir seluruh masyarakat buol hadir pada acara musyawarah untuk bersama-sama memikirkan apakah buol hanya tetap begini dan selamanya tidak ada perubahan, hal ini munculah Ide dari masyarakat buol yang ada di rantau, seperti Bapak Abdul Karim Mbouw (Ketua), Ibrahim Timumun (Sekertaris), Arif Lamaka,

⁴ Lihat Pada Bab IV. Hal 78-84, *Hubungan Sosial Kultur Kerajaan Buol dengan Gorontalo Awal Abad XIX*, Nopiya Idris (2014). Lihat dalam Buku Ibrahim Samad. *Sejarah Buol jilid 1 Buol*. (2000), hal 64-70

Moh. Yahya Pusadan. Hamzah P. Katjong, M. Yasin Pusadan, Dahlan Makatu, Harun. K. Siatan, Ramlah Butudoka, Ny. Ratna Lasman Mbouw, Mahadali Ismail, Amrid Butudoka, Amran Hi. Rasyid, Amran U. Salim.⁵ Mereka berembuk di palu, isi dari rembukan tersebut adalah *Mo Kumbulyopo Kito Tandanyo Tilro Bwuolyo* (Mari Kita Berkumpul Semua Orang Buol), baik yang ada di wilayah buol maupun di rantau, dari hasil rembukan tersebut, muncullah Temu Akrab Warga Buol (TAWAB).

Melalui TAWAB itulah, timbul Ide perjuangan menuntut pembentukan kabupaten yang terjadi pada tahun 1997. Dengan adanya musyawarah TAWAB melahirkan sebuah organisasi Ikatan Keluarga Indonesia Buol (IKIB), salah satu program IKIB adalah menuntut pemekaran wilayah Buol menjadi kabupaten dengan membentuk organisasi Panitia Pendukung Persiapan Pembentukan Kabupaten Buol Administratif (P.4.K.B.). Pada tahun 1997 inilah menjadi bentuk perjuangan masyarakat buol, keluar dari pemerintahan buol-tolitolil,⁶

Pada tahun 1999 wilayah buol menjadi kabupaten yang merupakan pemekaran dari kabupaten buol-toli-toli, kabupaten buol dimekarkan bersdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 1999, dan disahkan pada tanggal 16 september tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 november tahun 1999, atas nama Menteri Dalam Negeri yaitu Gubernur H.B Paliudju. Abdul Karim Mbouw dilantik di jakarta sebagai pejabat bupati Buol pertama pada tanggal 12 oktober tahun 1999.

⁵ Lihat Dokumen Delegasi Perjuangan Panitia Pendukung Persiapan Pembentukan Kabupaten Buol (P.4.K.B) Badan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Buol.

⁶Berdasarkan hasil wawancara Tokoh Delegasi Buol. Yakni Bapak Ibrahim Timumun (Sekertaris IKIB 1996-1999), tanggal 18 April 2018

Didasari oleh sumber seperti yang dijelaskan diatas peneliti ingin mengkaji dan menelaah dengan menggunakan analisis yang kuat untuk mendapatkan sumber-sumber yang akurat. Untuk mengetahui apa dan bagaimana proses serta gerakan-gerakan pada saat pemekaran kabupaten buol yang terjadi dari periode ke periode. Maka peneliti merasa perlu mengkaji adanya hubungan antara masa lalu dan gerakan sosial-politik masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan kabupaten buol provinsi sulawesi tengah dengan formasi judul *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol pada Periode 1964-1999*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam pada aspek-aspek penting tentang proses pembentukan kabupaten buol, Maka peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana kondisi masyarakat Buol sebelum terjadinya pemekaran pada tahun 1964-1999?
2. Bagaimana proses pemekaran kabupaten Buol tahun 1964-1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghadirkan sebuah rekonstruksi masa lampau tentang :

1. Tujuan :
 - a. Mengetahui bagaimana Kondisi masyarakat Buol sebelum terjadinya pemekaran Pada tahun 1999
 - b. Menjelaskan proses pemekaran kabupaten Buol tahun 1964-1999
2. Manfaat Penelitian
 - a. Masyarakat umum : Dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka memperkaya khasana ilmu pengetahuan bagi masyarakat lokal mengenai proses Pemekaran Kabupaten Buol
 - b. Pemerintah : Dapat dijadikan sebagai tambahan arsip sejarah dan kajian mahasiswa selanjutnya guna memperkaya ilmu pengetahuan di Kabupaten Buol

- c. Peneliti selanjutnya : Sebagai informasi atau referensi terkait dengan Pemekaran Kabupaten.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Secara spasial ruang lingkup penelitian terhadap masalah-masalah diatas dilakukan di wilayah kabupaten buol dan sekitarnya, yang berda di propinsi sulawesi tengah. Wilayah kabupaten buol berada di bagian utara propinsi sulawesi tengah dengan letak wilayah antara $0,35^{\circ} - 1,20^{\circ}$ LU dan $120,12^{\circ} - 122,09^{\circ}$ BT. Mempunyai batas-batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara — Dengan Laut Sulawesi sekaligus Negara Philipina, Sebelah Selatan — Dengan Kabupaten Gorontalo dan Parigi Moutong, Sebelah Timur — Dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Sebelah Barat — Dengan Kabupaten Toli-toli.⁷

Wilayah buol berdasarkan latar belakang sejarahnya merupakan bekas *onderafdeling* yang didalamnya termasuk *onderafdeling* Gorontalo, *onderafdeling* Bolaang Monggondo pada 17 agustus 1950. Kemudian wilayah buol pada tahun 1953 juga merupakan wilayah bekas *Neo Swapraja* yang tercakup di dalam beberapa daerah seperti *Swapraja* Gorontalo yang tempat kedudukan pemerintahan sulawesi utara, akan tetapi secara yuridis formal bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat di Makassar.⁸

Pada tahun 1960 wilayah buol bergabung dengan wilayah toli-toli dan membentuk salah satu kabupaten yang ada di propinsi sulawesi tengah yang bernama

⁷ Lihat dalam Buku Rahim Samad, *Sejarah Buol jilid 1*, 2000 : hal 1

⁸ (lihat Lembaran Negara Nomor 17 tahun 1953) dalam tesis Dwiana Hercahyani, *Sejarah Pembentukan Gorontalo dari Kabupaten menjadi Propinsi*. Hal 27-31

kabupaten buol-toli-toli, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959, diketahui bahwa pemerintahan berkedudukan di tolitoli dan menerapkan pemerintahan langsung atas daerah buol propinsi sulawesi tengah terjadi pada pertengahan abad XX, sehingga pemilihan pertengahan abad XX didasari oleh alasan yang cukup rasional secara historis.

Secara temporal pembahasan dalam penelitian ini adalah pada tahun 1964-1999 dengan demikian rentetan periode ini sudah representatif untuk ditelaah secara ilmiah. Tahun 1964 merupakan titik awal dalam penelitian ini, hal tersebut tidak lepas dari kenyataan sejarah perjalanan buol yang merupakan suatu proses pencarian identitas kewilayahanya masa era reformasi. Sejak era reformasi dimulai sistem pemerintahan berubah dari sentralistik menuju desentralisasi, perubahan itu menciptakan gelombang perubahan yang besar dimana di daerah-daerah memunculkan keinginan untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom. Perjuangan pemekaran daerah-daerah salah satu dampak dari kebebasan yang terpendam selama masa orde baru. Salah satu tuntutan era reformasi 1998 adalah otonomi daerah, Disaat itulah para perjuangan masyarakat buol ingin memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri. Pada tahun 1999 merupakan penetapan batasan penelitian ini sebagai masa akhir dari kabupaten buol-tolitoli dan pemerintah yang berkedudukan daerah toli-toli.

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian studi ini memfokuskan mengenai gerakan sosial-politik masyarakat buol, yang akan mengkaji tentang apa dan bagaimana proses dinamika pemekaran wilayah buol untuk mencari identitas kewilayahanya, yang pemerintahan berkedudukan di wilayah toli-toli. Dikembangkan

dalam lingkup pembahasan tentang pola kepemimpinan pada saat itu. adanya hubungan antara masa lalu yang tidak dapat dipisahkan dalam penulisan studi ini dan gerakan sosial-politik masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan kabupaten buol propinsi sulawesi tengah. Dengan adanya gerakakan sosial-politik masyarakat buol yang dibentuk dalam suatu wadah dengan tujuan adanya perubahan tata kehidupan masyarakat buol. Yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan politik pada pertengahan abad ke- XX yang secara jelas menunjukkan kecenderungan kearah integrasi progresif yang sudah tentu proses tersebut selalu mengalami pasang surut dalam mencari identitas khususya wilayah buol.

E. Tinjauan Pustaka

Pengumpulan data dan sumber merupakan langkah yang penting untuk kelengkapan penyusunan penulisan ini. Adanya sumber tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penulisan karena tidak mungkin dalam penulisan sejarah kita merekonstruksi sebuah sejarah apabila bahan-bahanya (sumber) tidak tersedia. Kalaupun bisa mungkin rekonstruksi itu tidak akan utuh dan kokoh. Pentingnya sebuah sumber ini dibuktikan dengan metode penelitian sejarah yang menempatkanya pada tahap pertama penelitian sejarah atau kita kenal dengan *heuristik*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi keperpustakaan daerah dan wawancara. studi perpustakaan daerah khususnya perpustakaan daerah Buol tidak begitu banyak data dan buku atau *literature* yang berkaitan langsung dengan tema study ini, karenanya peneliti mengambil langkah atau metode untuk mewawancara dengan parah tokoh masyarakat maupun pelaku peristiwa.

Sampai saat ini kajian atau penulisan ilmiah yang secara khusus membahas tentang *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol* ini masih kurang diperbincangkan di tengah penulisan sejarah lokal khususnya penulisan sejarah buol, Pada penelitian sejarah ini, penulis menggali sumber dari :Rahim Samad. Jilid I. 2000. *Sejarah Buol*. Palu: Reuni PNRI. Dan Rahim Samad. Jilid II. 2010. *Sejarah Buol*. Palu: Reuni PNRI. Buku ini membahas mengenai wilayah buol pada masa kerajaan Buol dan hubungan beberapa kerajaan yang ada di kawasan sulawesi pada umumnya banyak membahas terbentuknya kerajaan buol ± 1380 M-1594 M-1770 M dan sampai pada kepemimpinan raja-raja pada masa kolonial hindia belanda. Serta bagaimana hubungan kerajaan buol dan gorontalo, yang banyak membahas perebutan atau sengketa lokasi Geografis, Perkawinan, dan Peperangan antara kerajaan Buol dan kerajaan Limboto dan Gorontalo yang disebut *Perang Sumalata*. Sumber ini diperkuat oleh hasil penelitian Nopiya Idris (2014) *Hubungan Sosial Kultur Kerajaan Buol Dengan Gorontalo Awal Abad XIX* (Suatu penelitian dikabupaten buol sulawesi tengah)⁹

Relefansinya Buku dan karya ilmiah terhadap penelitian ini adalah kesamaannya membahas wilayah Buol, khususnya berdasarkan letak Geografisnya. Kesamaan lainnya membahas tentang Sejarah masa lalu wilayah Buol, yang merupakan suatu Identitas keberadaannya dan mempunyai keragaman tersendiri yang tidak bisa diseragamkan didalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia pada umumnya.

⁹ Lihat dalam Jurnal Nopiya Idris. *Hubungan sosial kultur kerajaan Buol dengan Gorontalo awal abad XIX*. (Gorontalo, Jurnal Di Universitas Negeri Gorontalo. 2014) hal, 78-111.

Dengan demikian, Perbedaan antara penelitian ini dengan buku serta karya ilmiah yang disebutkan diatas, memiliki perbedaan pendekatan objek kajiannya dan berdasarkan periode-periode yang dipilih oleh parah peneliti buku dan karya ilmiah sebelumnya. Perbedaan penelitian ini antara lain, *pertama* penelitian ini membahas dengan formasi judul *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol pada tahun 1964-1999*, Dan sudut pandang sosial-politik, di tandai dengan adanya gerakan-gerakan yang terstruktur dalam suatu lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat buol untuk lepas dari kabupaten buol-tolitoli yang berkedudukan diwilayah toli-toli pada tahun 1964-1999. *Kedua* penelitian ini di membahas pada berakhirnya masa-masa orde baru dan masuknya era reformasi tepatnya pada tahun 1997-1999.

Ibrahim Turungku, dalam buku *Upacara Adat Tradisional Suku Buol*, Februari 2006. Buku ini memaparkan silsilah dari adat suku buol yang berlandaskan syarah (Hukum islam) dan bersendikan kitabullah (Al-Qur'an) pada umumnya. Meski secara umum memiliki bahasan pokok pada masalah hukum adat secara tradisional namun karya ini sangat kaya akan informasi tentang budaya buol sebagai suatu identitas pada masa lalu yang merupakan mata rantai proses keberadaanya, baik menyangkut penduduk, bahasa, adat istiadat.

Hubungan buku yang dijabarkan di atas terhadap penelitian ini adalah membahas wilayah buol, baik dari aspek bahasa, dan masyarakatnya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan buku yang ditulis oleh Bapak Ibrahim Turungku adalah dari objek kajian ilmu. Dalam buku *Upacara Adat Tradisiaonal Suku Buol*, Februari 2006, yang ditulis oleh Bapak Ibrahim Turungku.

Ini adalah dalam pendekatan kajiannya yang lebih menonjol tentang kebudayaan melalui pendekatan ilmu Antropologi. sementara itu dalam penelitian Studi ini yang dilakukan peneliti. Dengan formasi judul *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol pada Tahun 1964-1999*. Memiliki perbedaan pendekatan objek kajian. Yaitu dari pendekatan ilmu sosial-politik, akan tetapi buku ini memberi banyak informasi tentang wilayah buol pada era tradisional serta adat istiadat yang merupakan ciri khas tersendiri suku Buol yang berlandaskan syarah (Hukum islam) dan bersendikan kitabullah (Al-Qur'an) yang banyak di lupakan oleh masyarakat buol pada masa sekerang, Selain pengetahuan historisnya, secara khusus buku ini sangat membantu dalam pengumpulan sumber tertulis mengenai wilayah buol dan sekitarnya, Dengan demikian buku ini sangat menunjang dalam penelitian yang nanti akan dilakukan penulis.

Diluar dari sumber buku yang disebutkan diatas patut juga di sebutkan karya-karya penulisan sebelumnya, yakni yang ditulis oleh Sukrinto S. Alijuana tahun 2014 dengan judul *Perkembangan Pendidikan di Buol Abad XX*, merupakan jurnal yang telah diperiksa dan disetujui oleh beberapa pembimbing yakni Bapak Alm.Surya Kobi,dan Ibu Hj. Yusni Pakaya, buku ini menjelaskan proses perkembangan pendidikan Buol. Dengan demikian, jurnal ini sangat menunjang dalam penelitian yang nanti akan dilakukan penulis.

Adapun Relevansi dari penelitian studi yang dilakukan oleh peneliti dengan formasi judul *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol Pada Tahun 1964-1999*. Dan hubungan penelitian sebelumnya, adalah membahas wilayah buol dan sekitarnya

ditinjau dari letak geografisnya, dinamika masyarakat buol dari masa ke masa dan bahasa suku buol yang menjadi Ciri khas masyarakat buol pada umumnya. Sementara itu, perbedaan dari peneliti sebelumnya terhadap penelitian studi ini adalah peneliti sebelumnya lebih mengkaji wilayah buol dari aspek pendidikan dengan menggunakan pendekatan ilmu pendidikan. yang lebih dominan membahas tentang bagaimana proses *Perkembangan Pendidikan di Buol pada Adad ke XX* secara keseluruhan. Akan tetapi peneliti studi ini dengan formasi judul *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol pada tahun 1964-1999* pada khususnya mengkaji serta menelaah Apa dan Bagaimana proses serta ide terjadinya pemekaran kabupaten buol. Dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial-politik, dalam prespektif sejarah.

Penelitian ilmiah yang ditulis oleh : Dwiana Hercahyanti, 2008, dengan judul *Sejarah Pembentukan Gorontalo dari kabupaten menjadi propinsi 1953-2000*. Karya ini merupakan tesis yang dipersembahkan untuk memperoleh Gelar Magister Humaniora dikampus Universitas Indonesia (UI). Tesis ini membahas tentang Sejarah pembentukan gorontalo yang banyak menjelaskan tentang peraturan-peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah, yang pada tahun 1953 wilayah gorontalo merupakan daerah otonom (Swapraja Gorontalo), kemudian pada tahun 1998-2000 adalah lahirnya otonomi daerah yang pengaruhnya di wilayah gorontalo dan lahirnya provinsi gorontalo berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000. Relevansi dari penelitian tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti studi ini adalah menyangkut bagaimana buol pada masa pasca kemerdekaan dan keluar dari sulawesi utara, kemudian sama-sama

membahas tentang pembentukan atau yang sering di sebut dengan pemekaran suatu wilayah dan juga berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang daerah, perbedaan dari penelitian ini ditinjau dari segi geografisnya tesis ini dilakukan wilayah gorontalo, sementara penelitian studi yang akan dilakukan peneliti membahas khususnya wilayah buol dan sekitarnya. Akan tetapi, tesis ini sangat penting dalam penelitian yang nanti akan dilakukan penulis. Di karenakan dalam penulisan tesis ini masih berhubungan dengan wilayah Buol

Dari beberapa sumber yang peneliti jabarkan diatas belum ada yang membahas *Dinamika Pemekaran kabupaten Buol pada tahun 1964-1999*. Untuk mengetahui apa dan bagaimana proses serta gerakan-gerakan pada saat pemekaran kabupaten buol yang terjadi dari periode ke periode. Maka peneliti merasa perlu mengkaji adanya hubungan antara masa lalu dan gerakan sosial-politik Masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan kabupaten buol provinsi sulawesi tengah.

F. Kerangka Konseptual

Secara signifikan penelitian terhadap masalah-masalah diatas dilakukan dengan menggunakan konsep Otonomi daerah, Desentralisasi serta sosial-politik sehingga menimbulkan aksi sosial-politik masyarakat untuk memekarkan diri kabupaten daerah buol-toli-toli. Selain konsep diatas, dampak dari Pemerintahan yang berkedudukan di wilayah Toli-toli pada saat itu menyebabkan munculnya gerakan sosial-politik masyarakat buol dalam upaya memekarkan atau memisahkan diri dari wilayah toli-toli, Dengan demikian hal ini mutlak dianalisis dengan pendekatan ilmu sosial, dan ilmu politik. Hal ini dianggap relevan dalam penelitian ini, dengan

beberapa konsep serta pendekatan ilmu lainnya terhadap masalah-masalah penelitian studi ini akan lebih akurat dalam penulisan serta bagaimana mengkaji proses penerapan, serta kondisi Politik sebelum dan sesudah pemerintahan kabupaten buol-tolitoli yang berkedudukan di wilayah toli-toli. Dengan menggunakan pendekatan ilmu politik¹⁰ dan ilmu lain. aspek penerapan sistem pemerintahan langsung di suatu daerah sangat berkaitan dengan studi kebijakan, politik, ekonomi dan kewilayahan.

Berbicara tentang pemekaran tidak lepas dari konsep otonomi daerah dan konsep desentralisasi, karena otonomi merupakan salah satu perwujudan dari desentralisasi. Antara desentralisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

otonomi atau *Autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.¹¹

Dwidjowijoto (2000;79) seperti dikutip oleh Rosidin dalam buku, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* mengartikan bahwa otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. secara prinsipil

¹⁰ Seiring dengan perkembangan pendekatan historis dalam ilmu politik, berkembang pula pendekatan legalistik, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang memandang ilmu politik dari aspek konstitusional dan peraturan perundang-undangan, lebih jelas lihat Buku Eko Handoyo *Sosiologi Politik*. (Yogyakarta, Ombak, 2013) hal. 79.

¹¹ Lebih jelasnya lihat buku H. Utang Rosidin, S.H, M.H. *Otonom Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung, Pustaka setia, 2010) hal, 85

terdapat dua hal yang tercakup dalam toonomi, yaitu hak wewenang untuk menejemi daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanejemi daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State Government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari daerah pusat.¹²

Dengan demikian dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya dilapangan, kedua istilah tersebut mempunyai karakteristik yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pernyataan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah.

Lebih lanjut Rasyid (1997;85) seperti yang dikutip dalam buku Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*,(2010). Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah, melainkan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri

¹² *Ibid*, hal 85

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹³

Dari beberapa pendapat diatas bahwa Otonomi merupakan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tujuan mendorong untuk pemberdayaan masyarakat menumbuhkan prakarsadan kreatifitas, serta meningkatkan peran masyarakat setempat dan mengembangkan peran dan pungsai DPRD sesuai denga peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi yang dikutip dalam buku Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* adalah suatu istilah yang luas dan selalau manyangkut persoalan *power* (kekuatan), besanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk menjalnlkan urusan-urusan pemerintah didaerah,¹⁴

Sedangkan menurut Sarundajang dalam *Encyclopedia Of The Social Scinces*, menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang Legislatif, Yudikatif, maupun Administratif. dalam Ensiklopedia tersebut, bahwa desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi sebab istilah ini secara umum lebih lebih diartikan sebagai pendeglasian dari atasan ke bawahanya

¹³ *Ibid* hal 85-93

¹⁴ *Ibid*, hal, 86. dan lihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (7) bawa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom.

untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasnya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya.¹⁵

Pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (7) bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangna untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dari penjelasan diatas bahwa desentralisasi penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administrative yang merupakan bukti usaha yang telah dicapai oleh suatu individu, kelompok yang diciptakan melalui hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan cara keuletan kerja baik dibidang pembelajaran maupun pembangunan untuk kemajuan daerahnya guna menjadikan manusia (masyarakat) lebih sejahtera.

¹⁵*Ibid.* hal 85

G. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusunan studi ini menggunakan langkah-langkah rekronstruksi metodologis yang bedasarkan metodologi penelitian sejarah. Dengan Penulisan formasi judul *Dinamika pemekaran kabupaten Buol Periode 1964-1999*. dan bagaimana proses serta kondisi sebelum dan sesudah dimekarkan menjadi satu kabupaten. Hal ini dianggap perlu menjaga dan melestarikan sebuah peristiwa yang terjadi di masa tersebut diantaranya peristiwa seputar tahun 1964-1999 yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Penulisan sejarah yang valid maka fakta atau bukti sejarah yang sangat perlu sebagai acuan penulis dalam menuliskan setiap peristiwa yang terjadi.¹⁶Karena fakta merupakan landasan dari objek terhadap suatu peristiwa sejarah dan. Sebagaimana penelitian sejarah memiliki patokan, kaidah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah karya sejarah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian tahapan-tahapan metologi sejarah terdiri dari empat tahap penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Maka penyusunan studi ini menggunakan langkah-langkah rekronstruksi metodologis yang bedasarkan metodologi penelitian sejarah. Agar dapat terstruktur dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Negeri Gorontalo.

¹⁶ Lihat dalam buku Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah* (cetakan ke II , Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2016) hal 61-80. hal Senada juga seperti yang disampaikan oleh H. Sulasman, M.Hum. *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung, CV Pustaka Setia 2014) hal 93-108

a) Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristics atau dalam bahasa jerman *Quellenkunde*, adalah sebuah langkah awal kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.¹⁷

Tahapan heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, pikiran dan juga perasaan. Ketika mencari dan mendapatka apa yang dicari maka dapat dirasakan seperti menemukan (tambang emas). Tetapi jika setelah bersusah payah kemana-mana (didalam negeri maupun luar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka bisa frustrasi. Maka sebelum mengalami yang terakhir ini, maka harus lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran untuk mengatur strategi dimana dan bagaimana mendapatkan bahan-bahan tersebut siapa-siapa atau instansi apa yang dapat dihubungi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi, fotocopy informan.dll.¹⁸

Data yang diambil dalam proses pengumpulan jejak-jejak sejarah ini melalui informan yang mengetahui dengan pasti peristiwa yang terjadi di wilayah ini (wilaah Buol pada tahun 1964-1999). Adapun informan yang berhasil dihimpun berasal dari kalangan yang berbeda-beda, dimulai dari kalangan budayawan, pemerhati sejarah, tokoh masyarakat, panitia pemekaran Kabupaten Buol (IKIB dan TAWAB), dan dari kalangan instansi pemerintah daerah.dimana pada saat kabupaten Buol-Tolitoli masih bergabung dengan pusat pemerintahan berada di wilayah Toli-Toli beberapa informan

¹⁷ Carrard, 1992:2-4; Cf, Gee, 1950:281. Dikutip dalam Buku Helius Syamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta, Penerbit Ombak 2016).Hal. 55

¹⁸*Ibid.* hal. 55

mengatakan, bahwa didalam daerah tingkat II Buol-tolitoli khususnya wilayah Buol yang terdiri dari lima kecamatan yaitu, Paleleh, Bunobogu, Bokat, Biau, Momunu, sangat potensial untuk di mekarkan menjadi kabupaten,¹⁹ Ini merupakan pernyataan yang sangat menarik berdasarkan kondisi masa lalu dari penggabungan dua wilayah, Kabupaten Buol-Tolitoli dengan hal tersebut munculah Gerakan-Gerakan Sosial Politik dari masyarakat Buol.

Dengan demikian, sumber awal dari penelitian ini adalah (*Sumber lisan*) yang banyak menceritakan Kondisi Buol sebelum terjadinya pemekaran dan bagaimana proses pembentukan atau pemekaran pada saat itu. Penggunaan sumber lisan adalah cukup penting dalam penelitian ini. Semua “saksi mata“ ini di sebut sumber-sumber sejarah (*hisrical sources*) segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang kenyataan atau kegiatan manusia pada saat itu.²⁰

Selain sumber lisan yang telah dijabarkan diatas, Pada penelitian sejarah ini, penulis menggali sumber Buku : Rahim Samad. Jilid I. 2000. *Sejarah Buol*. Palu : Reuni PNRI. Dan Rahim Samad. Jilid II. 2010. *Sejarah Buol*. Palu : Reuni PNRI. Buku ini membahas mengenai wilayah Buol pada masa kerajaan Buol dan hubungan beberapa kerajaan sampai pada Buol bergabung dengan Sulawesi Tenggara pada tahun 1964 pada umumnya banyak membahas Terbentuknya Kerajaan Buol (±Tahun

¹⁹ Wawancara dengan bapak H. Ibrahim Timumun, BA. (wawancara tanggal 17 April 2018) selaku Tokoh Delegasi masyarakat Buol yang menjabat sebagai Sekertaris IKIB dan P.4.K.B.

²⁰ Lihat dalam buku Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah* (cetakan ke II , Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2016) hal, 61 dan 67

1380 M-1594 M-1770 M) dan sampai pada kepemimpinan raja-raja pada masa kolonial hindia belanda. Serta bagaimana hubungan kerajaan Buol dan Gorontalo pada saat itu serta kondisi Buol menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Buol-Tolitoli, sumber ini juga di perkuat oleh hasil penelitian sebelumnya sudah di uji kebenarannya dalam penulisan sejarah. Di salah satu Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan pendidikan sejarah, Jurnal yang ditulis oleh Sukrinto s. Alijuana tahun 2014 dengan judul *Perkembangan Pendidikan di Buol Abad XX*. yang telah menggambarkan kondisi-kondisi masa lalu buol termasuk pada Bagaimana keadaan pendidikan wilayah pada masa pemerintahan kabupaten buol-tolitoli yang berkedudukan di wilayah Tolitoli pada saat itu. Demikian beberapa sumber yang sementara telah didapatkan oleh peneliti, selebihnya akan diusahakan pada waktu mendatang guna penyempurnaan dalam merekonstruksi dan eksplanasi. Penulisan dalam formasi judul *Dinamika Pemekaran Buol pada tahun 1964-1999*

b) Kritik

Kritik adalah kegiatan setelah penelitian berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyaring secara kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpul dalam usaha mencari *truth* (kebenaran). Pada kritik sumber ini peneliti dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar.²¹ Agar terhindar dari mitos yang dapat mengurangi keilmiahan dari sebuah karya penelitian studi sejarah sejarah ini,

²¹*Ibid*, hal 83

Verifikasi, dimana seorang peneliti berusaha menilai sumber-sumber yang telah ada. Pada proses ini terdiri dari dua aspek yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berusaha mempersoalkan apakah suatu sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sartono Kartodirjo (1984:16) mengemukakan bahwa: kritik eksternal meneliti apakah dokumen tersebut autentik, yaitu kenyataan identitasnya jadi bukan tiruan atau palsu. Kesemuanya dilakukan dengan melalui bahan yang dipakai, jenis, tulisan, gaya bahasa dan lain sebagainya. Sementara itu, kritik internal berusaha mempersoalkan apakah isi dari sebuah informasi dapat di pertanggung jawabkan sebagai sebuah informasi terkait dengan persoalan yang akan di teliti dalam masalah kritik internal atau mencari kredibilitas.²²

Dengan demikian, dalam peneliti studi ini Para informan yang diselidiki mempunyai pengetahuan yang bisa dikatakan relatif baik dalam menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang benar-benar terjadi di wilayah Buol khususnya sebelum dan sesudah pemekaran. selbihnya peneliti dapati dari bebrapa dokumen yang membahas tentang peristiwa di atas. Namun adapula referensi yang ditemukan berupa dokumen buku dan sejumlah karya ilmiah yang sudah di uji ke absahaanya.

c) Interpretasi

Interprestasi, menapsirkan sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan kebenaran informasi yang dapat ditulis dan dipublikasikan. Tahapan ini

²² *Ibid.* hal, 55

membutuhkan kehati-hatian dan integritas seorang penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta.²³Peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi sebelum dan sesudah pembentukan kabupaten buol merupakan suatu rentetan perjalanan yang sangat panjang. Beberapa sumber penulis dapati dari sumber sekunder, yaitu sumber yang ditemukan melalui wawancara, karya ilmiah. Dan buku maupun cerita rakyat yang turun temurun mengenai peristiwa bersejarah yang berada di wilayah Buol. Sehingga dalam menafsirkan data tersebut dilakukan klasifikasi sumber mana yang dibutuhkan yang akan mendukung dalam penulisan penelitian ini.

d) Historiografi

Historiografi merupakan penulisan sejarah dengan merangkaikan fakta-fakta sebagai sumber, kemahiran menulis dalam menstruktur fakta-fakta dalam bentuk tulisan sejarah menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang suda dianalisa. Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian dari metode penulisan sejarah. Tahap heuristik, kritik, serta interpretasi kemudian di elaborasikan sehingga menghasilkan sebuah historiografi. Dimana seorang peneliti mulai menulis sejarah dari data-data yang ada dan melalui tahapan-tahapn sebelumnya. Dalam penulisan sejarah umumnya sangat memperhatikan aspek kronologis agar hasilnya dapat menarik dan sistematik. Yang sehingganya bahwa dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk dasar teknik tulis menulis yaitu deskripsi,

²³Lihat dalam buku Dr. H. Sulasman, M.Hum. *Metodologi Penelitian Sejarah.* (Bandung, CV Pustaka Setia 2014) hal 107-130

narasi dan analisis Dengan demikian teknik tersebut dapat digunakan dan memadai dalam penyusunan penulisan penelitian ini.²⁴

Adapun yang disajikan dalam penulisan ini adalah hal-hal yang terkait dengan sumber yang dimiliki oleh peneliti dalam penyusunan tulisan ini, terkait atau masuk dalam ruang lingkup kajian sejarah Buol khususnya sebelum dan sesudah pemekaran. Dilakukan dengan memberi makna atas simbol-simbol sejarah melalui metode atau cara penghayatan maupun dengan dengan mencari hubungan sebab akibat. Penjelasan dilakukan baik secara naratif maupun analisis sintesis (menguraikan dan menyatukan) dengan menggunakan bahasa buku atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya penjelasan hasil penelitian disajikan dalam bentuk skripsi.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian harus memiliki waktu, agar penelitian dapat terarah dan berjalan dengan baik serta jelas temporalnya. Maka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Kegiatan	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
Usulan Proposal	√	√								
Pembimbingan						√				
Penelitian						√	√			
Seleksi Data								√		
Penyusunan	√	√				√	√		√	√

²⁴Lihat dalam buku Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah* (cetakan ke II , Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2016) hal 100-112

Konsultasi dengan pendamping akan dilakukan setiap saat karena dalam setiap tahap memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga dalam setiap tahap akan memerlukan banyak arahan serta bimbingan.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan dalam metode Penelitian Sejarah. Dalam tulisan ini, pembahasan mengenai *Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol Pada Tahu 1964-1999*, ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Menguraikan Pendahuluan dengan delapan sub-bab meliputi; sub-bab pertama menguraikan latar belakang masalah, sub-bab kedua menguraikan Rumusan Masalah, sub-bab ketiga menguraikan Tujuan dan manfaat, sub-bab keempat menguraikan Ruang Lingkup Penelitian, sub-bab kelima menguraikan Tinjauan pustaka, sub-bab keenam menguraikan Kerangka Konseptual, sub-bab ketujuh menguraikan Metode Penelitian, dan sub-bab kedelapan menguraikan Jadwal Penelitian, Sub-bab kesembilan menguraikan Sistematika penulisan.

Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab; sub-bab pertama menguraikan Keadaan Geografis, sub-bab kedua menguraikan Keadaan Demografis, sub-bab ketiga menguraikan Keadaan Sosial Budaya,

Bab III Kondisi Buol Sebelum Pemekaran tahun 1953-1999, yang terdiri dari beberapa sub bab; pertama menguraikan Latar Belakang Buol bergabung dengan Toli-toli tahun 1953. Kedua Buol Bergabung dengan Daerah Sulawesi Tengah tahun

1955. Ketiga Kondisi Kabupaten Buol-Toltoli 1964-1999, yang terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Bidang Pendidikan. Kondisi Ekonomi.

Bab IV, Dinamika Pemekaran Kabupaten Buol Pada Tahun 1964-1999 yang terdiri dari beberapa sub bab, Proses Perjuangan Pembentukan Kabupaten Buol yang terdiri dari Fase Pertama Dan fase Kedua, Penetapan Daerah Buol menjadi daerah Otonom Tahun 1999, Tokoh-tokoh Pemekarsa Pemekaran Wilayah Buol 1966-1999.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan Jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dan saran sebagai perbaikan dalam peneliti selanjutnya.